

**TESIS**

**EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK)  
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 012-016-019/ PUU-IV/ 2006**



**GAGAT GATRA KRISNANTA**

**No. Mhs : 08.1245 / PS/ MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2010**

**TESIS**

**EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK)  
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 012-016-019/ PUU-IV/ 2006**



**GAGAT GATRA KRISNANTA**

**No. Mhs : 08.1245/ PS/ MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2010**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Gagat Gatra Krisnanta  
Nomor Mahasiswa : 08.1245/ PS/ MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Studi Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/  
2006


**Pembimbing**

**Tanggal**

**Tanda tangan**

Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., SH., M.Hum.

12-03-2010  
.....

  
.....



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Gagat Gatra Krisnanta  
Nomor Mahasiswa : 08.1245/ PS/ MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Studi Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/  
2006

<b>Penguji</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>(ketua)</b> Prof. Dr. Dra. MG. Endang S. SH., M.Hum.	12-03-2010	
<b>(Sekretaris)</b> G. Aryadi, SH. MH.	15-03-2010	
<b>(Anggota)</b> Dr. Paulinus Soge, SH., M.Hum.	15-03-2010	



Ketua Program Studi

PROGRAM  
PASCASARJANA

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

## **PERNYATAAN**

Dalam Tesis yang berjudul **“EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012-016-019/ PUU-IV/ 2006”** penulis ingin menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam tesis ini adalah hasil dari penulis sendiri, dimana di dalam penulisan ini didukung dengan karya ilmiah dari penulis lain, apabila dalam penulisan ini terdapat plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi.

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mengetahui model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian politik hukum untuk mengkaji eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-018-019/ PUU-IV/ 2006 dan kajian sejarah hukum untuk mengkaji sejarah penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia dari era Orde Lama hingga masa Refomasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kerangka berpikir deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yaitu norma hukum positif kemudian disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia adalah perkara-perkara korupsi ditangani oleh badan tersendiri tanpa campur tangan dari lembaga penegak hukum lain, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, seperti yang dilaksanakan di Singapura

***Kata kunci : Eksistensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/2006***

## ABSTRACT

This study aims to determine the existence of the Corruption Eradication Commission in an effort to eradicate corruption and to find a model appropriate to eradicate corruption to take place in Indonesia. This study uses the laws of political studies to assess the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) with the issuance of the Constitutional Court Decision No. 012-018-019 / PUU-IV / 2006 and study the legal history to examine the history of the handling of corruption in Indonesia from the Old Order era to the time Refomasi.

This research uses research methods with normative legal framework of deductive reasoning that is opposite from the general preposition that the truth has been known that positive legal norms and then summed into the things that is the existence of a special nature Corruption Eradication Commission and to find a model appropriate to eradicate corruption to take place in Indonesia.

Issuance of the Constitutional Court Decision No. 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 to cancel Article 53 of Law Number 30 Year 2002 on Eradication Commission governing Corruption Corruption Court is not meant to weaken the existence of the Corruption Eradication Commission, but provides a foundation stronger laws for they exist Corruption Court and the eradication of corruption in Indonesia.

a model appropriate to eradicate corruption to take place in Indonesia is corruption cases handled by a separate entity without any interference from other law enforcement agencies, so as to avoid overlapping of authority.

Keywords: *Existence, the Corruption Eradication Commission, the Constitutional Court Decision No. 012-016-019 / PUU-IV / 2006*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga, atas berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ tesis yang berjudul “**EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 012-016-019/ PUU-IV/2006**” dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. **Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis.

Penulis dalam melaksanakan penulisan ini tentu tidak akan terwujud dan berjalan lancar tanpa dorongan bantuan maupun kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. B. Bambang Riyanto, SH., M.hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



4. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu, serta mendiang kakakku yang ada di surga, serta segenap keluargaku yang telah mendorong dan memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ucapan khusus untuk seseorang yang selalu dihati **Dyah Hayu Tri Prasetyaningsih**, terima kasih atas waktu dan dukungannya saat suka dan duka yang selalu memberi dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Ucapan khusus untuk teman-temanku dan sahabat yang terbaik David, Cahyo dan Isthi yang selalu memberi semangat dan dorongan dan selalu setia mendengarkan segala keluh dan kesah dalam penulisan hukum ini.
8. Ucapan khusus untuk A. Hendro Dwi Setyo Utomo. SH., M.H um. atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Teman-teman Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Bapak Maryono, Yudhit, Soko, Afra, Nany, Antonius, Sondang, Merlin.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih semuanya dan semoga Tuhan selalu memberkati.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga karya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Februari 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Keaslian Penelitian.....	11
3. Manfaat Penelitian.....	14
B. Tujuan Penelitian.....	15
C. Kerangka Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan tentang eksistensi.....	18
B. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.....	20
C. Tinjauan umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	31
D. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan.....	39
C. Sumber data.....	40
D. Analisis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	44
1. Eksistensi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).....	44
2. Keberadaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	50
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	58
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Masa Datang.....	65
B. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara.....	68
1. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	68
2. Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	88
Daftar Pustaka.....	89